

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Ibu kota kabupaten ini adalah Kota Kudus, terletak di jalur pantai timur laut Jawa Tengah antara Kota Semarang dan Kota Surabaya. Kota ini berjarak 51 kilometer dari timur Kota Semarang. Kabupaten Kudus mempunyai luas wilayah sebesar 425,15 km² dengan tingkat kepadatan populasi sebanyak 2.002,34 jiwa/km². Secara administratif terbagi menjadi 19 kecamatan, 9 kelurahan, dan 124 desa. Secara astronomis Kabupaten Kudus terletak pada koordinat 06°51'-07°16' LS dan 110°36'- 110°50' BT. Adapun batas wilayah Kabupaten Kudus meliputi

- a. Bagian utara: Kabupaten Jepara
- b. Bagian timur: Kabupaten Pati
- c. Bagian selatan: Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak
- d. Bagian barat: Kabupaten Demak.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kudus adalah dataran rendah. Di sebagian wilayah utara terdapat pegunungan (yaitu Gunung Muria), dengan puncak Puncak Saptorenggo (1.602 m dpl), Puncak Rahtawu (1.522 m dpl), dan Puncak Argojembangan (1.410 m dpl). Sungai terbesar adalah Sungai Serang yang mengalir di sebelah barat, membatasi Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak. Kudus dibelah oleh Sungai Gelis di bagian tengah sehingga terdapat istilah Kudus Barat dan Kudus Timur.¹

Topografi wilayah Kabupaten Kudus meliputi

- a. Dataran: Kecamatan Kota, Jati, Kaliwungu, Undaan Mejobo, Jekulo dengan luas 28.863,90 Ha
- b. Bergelombang: Kecamatan Bae dengan luas 6.665,27 Ha
- c. Curam: Kecamatan Gebog dan Dawe dengan luas 3.047 Ha
- d. Sangat curam: Kecamatan Dawe dengan luas 3.939,50 Ha

¹ Kabupaten Kudus ,wikipedia, diakses pada 20 Maret 2020, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kudus

Luas Penggunaan Lahan

Dari luas Kabupaten Kudus sebesar 42.516 Ha, penggunaan lahan terbagi menjadi lahan persawahan, lahan kering dan peruntukan lahan lainnya.

Lahan persawahan Di Kabupaten Kudus seluas 21.704 Ha terdiri dari :

- a. sawah berpengairan teknis seluas 4.203 Ha
- b. sawah berpengairan setengah teknis 5.756 Ha
- c. sawah berpengairan sederhana seluas 3.429 Ha
- d. sawah tadah hujan seluas 7.698 Ha
- e. lainnya (rawa dan sungai) seluas 618 Ha

Lahan kering di Kabupaten Kudus seluas 18.552 Ha terdiri dari :

- a. Bangunan dan halaman 9.983 Ha
- b. Tegall, kebun, ladang, huma seluas 6.100 Ha
- c. Sementara tidak diusahakan 168 Ha
- d. Lahan untuk tanaman kayu dan hutan rakyat 139 Ha
- e. Perkebunan negara 112 Ha
- f. Hutan negara 1.882 Ha
- g. Lainnya 168 Ha

Penggunaan untuk lahan lainnya seluas 2.260 Ha.

- a. Lahan kritis di Kabupaten Kudus seluas 8.174,4 Ha.
- b. Lahan kritis di luar kawasan hutan luasnya sekitar 6.525,4 Ha terdiri dari :
 - 1) Kawasan budidaya luas 5.905,4 Ha (lahan kritis 398,2 Ha, agak kritis 1.778,5 Ha, potensial kritis 3.728,7 Ha)
 - 2) Kawasan lindung luas 620 Ha (kritis 495 Ha, agak kritis 113 Ha, potensial kritis 12 Ha)
- c. Lahan kritis di dalam kawasan hutan luasnya 1.649 Ha (kritis 466 Ha, agak kritis 1.183 Ha).²

Melihat potensi luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Kudus, Pendapatan Asli Daerah didukung oleh pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Adapun rincian PAD Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel 4.1.

² Geografis Kudus Sudrajat, diakses 18 Mei 2020, <https://sudrajat7.wordpress.com/geog rafis/>

Tabel 4.1
Realisasi PAD Kabupaten Kudus Tahun 2015-2019

Uraian	Realisasi (dalam ribuan rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
PAD	259.295.905	279.239.106	375.185.351	337.364.609	343.821.947
Pajak Daerah	78.860.989	84.453.872	103.927.599	114.155.438	125.762.587
Retribusi Daerah	18.093.279	16.799.373	19.849.728	18.367.332	20.053.579
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.051.589	6.437.703	17.667.058	7.574.356	9.277.166
Lain-Lain PAD yang Sah	154.290.047	171.548.156	224.576.816	197.267.481	188.728.614

Sumber: BPPKAD Kudus

2. Profil BPPKAD Kabupaten Kudus

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus didasarkan pada kebutuhan daerah untuk memenuhi tuntutan yang selalu dinamis, dengan pemberdayaan kemampuan kapasitas internal sumber daya yang ada untuk melaksanakan dan mendukung tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sekaligus adanya suatu keinginan agar Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus mampu mewujudkan *good governance* diantaranya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan yang baik diperlukan Sumber Daya Aparatur yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional, beretika dan bertanggung jawab dengan tetap berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus

Azas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Kudus adalah bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dan diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja.

Adapun mekanisme kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja BPPKAD

- b. Menentukan target pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain PAD yang sah.
- c. Menyusun Rancangan APBD dan Perubahan APBD
- d. Menyusun laporan semester tentang pelaksanaan APBD
- e. Menyusun Rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- f. Melaksanakan penatausahaan keuangan daerah, perbendaharaan dan kas daerah
- g. Melaksanakan penatausahaan aset daerah dan mengelola Barang Milik Daerah

a. Visi dan Misi BPPKAD Kabupaten Kudus

1) Visi

Terwujudnya transparansi pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel

2) Misi

- a) Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis Teknologi Informasi
- b) Meningkatkan Pendapatan Daerah
- c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan daerah
- d) Struktur Organisasi

b. Struktur BPPKAD Kabupaten Kudus

Sebagaimana diatur Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kabupaten Kudus bahwa susunan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - d) Bidang Pendapatan, membawahkan : Subbid. Perencanaan dan Penetapan; Subbid. Pendataan dan Pendaftaran; dan Subbid. Penagihan dan Keberatan.
 - e) Bidang Anggaran membawahkan: Subbid. Anggaran Pemerintahan dan Sosbud; dan Subbid. Anggaran Prasarana Wilayah Ekonomi dan SDA.
 - f) Bidang Perbendaharaan membawahkan: Subbid. Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah; dan Subbid. Belanja Langsung.

- g) Bidang Akuntansi membawahkan: Subbid. Akuntansi Pemerintahan dan Sosbud; dan Subbid. Akuntansi Prasarana Wilayah Ekonomi dan SDA.
 - h) Bidang Pengelolaan Aset daerah Subbid. Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset Daerah; Subbid. Penatausahaan Aset Daerah; dan Subbid. Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah.
- 3) Kepala Unit Pelayanan Terpadu Pajak Daerah³

B. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dalam pengujian variabel penelitian dengan model regresi apakah dalam variabel dan model regresinya terjadi penyakit atau kesalahan.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data adalah uji yang dilakukan untuk menguji apakah model regresi variabel independen dan variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak.⁴ Pengujian normalitas data variabel efisiensi, variabel efektivitas, kontribusi serta variabel PAD dapat dilihat pada output hasil perhitungan SPSS 16 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.67184926
Most Extreme Differences	Absolute	.255
	Positive	.247
	Negative	-.255
Kolmogorov-Smirnov Z		.570
Asymp. Sig. (2-tailed)		.902

a. Test distribution is Normal.

Sumber: data sekunder diolah peneliti

³ Profil BPPKAD Kabupaten Kudus BPPKAD Kudus, diakses tanggal 20 Maret 2020, <https://bppkad.kuduskab.go.id>

⁴ Masrukin, *Statistik Inferensial Aplikasi Progam SPSS* (Kudus: Media Ilmu Press, 2014), 88.

Data dikatakan berdistribusi normal didasarkan pada jika nilai uji signifikan uji Kolmogorov-Smirnov $Z > 0,05$. Sebaliknya, nilai signifikan uji Komogolov Smirov $< 0,05$ maka distribusi data dikatakan tidak berdistribusi normal. Pada pengujian di atas menghasilkan $0,902 > 0,05$, maka dapat dikatakan data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinialitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIP). Nilai cutoff yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.⁵ Untuk mengetahui multikolinieritas variabel, maka diuji dengan menggunakan alat bantu program SPSS versi 16 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-736.610	18.794		-39.195	.016		
Efisiensi PBB-P2	13.867	1.039	.237	13.347	.048	.690	1.448
Efektivitas PBB-P2	12.421	.189	1.224	65.604	.010	.625	1.600
Kontribusi PBB-P2	-48.059	1.311	-.774	-36.663	.017	.489	2.047

a. Dependent Variable: PAD (milyar rupiah)

Hasil pengujian multikolinieritas di atas menunjukkan bahwa semua nilai VIF kurang dari angka 10 dan semua nilai *tolerance* di atas angka 0,01 yaitu 0,690; 0,625 dan 0,489 maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam model regresi yang digunakan yaitu efisiensi PBB-P2 (X1) sebesar 1,448, efektivitas PBB-P2 (X2) sebesar 1,600 dan kontribusi PBB-P2 (X3) sebesar 2,047 maka tidak terdapat

⁵ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), 105

problem multikolinieritas dan layak digunakan dalam penelitian ini.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.⁶ Test pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membandingkan nilai DW dengan du dan dl pada tabel. Untuk mengetahui autokorelasi variabel, maka diuji dengan menggunakan alat bantu program SPSS versi 16 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1.000 ^a	1.000	.999	1.34370	2.942

a. Predictors: (Constant), Kontribusi PBB-P2, Efisiensi PBB-P2, Efektivitas PBB-P2

b. Dependent Variable: PAD (milyar rupiah)

Dari hasil pengujian autokorelasi nilai Durbin Watson sebesar 2,942 nilai tersebut dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5% jumlah sampel 15 dan jumlah variabel bebas 3, maka diperoleh nilai $dl = 1,7501$ dan nilai $du = 0,814$. Oleh karena nilai $d = 2,942$ diantara $du < d < 4-du$ yaitu $(0,814 < 2,942 < 3,186)$ maka sesuai kaidah pengambilan keputusan disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif pada model regresi.

4. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat pada grafik *scatterplot*. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi

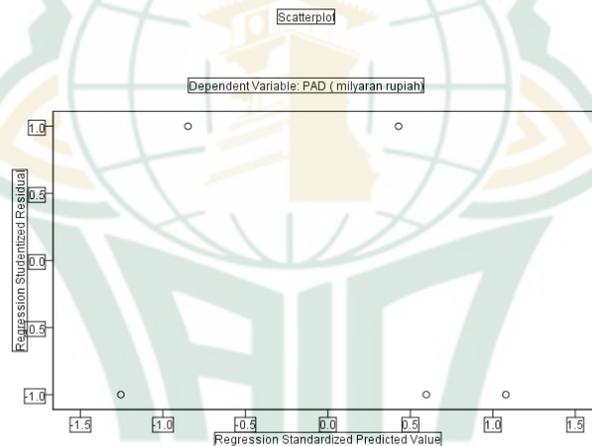
⁶ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 183.

heterokedastisitas. Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji Uji heterokedastisitas adalah:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu (bergelombang melebar kemudian menyempit), maka mengindikasi telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.⁷

Untuk mengetahui heteroskedastisitas variabel, maka diuji dengan menggunakan alat bantu program SPSS versi 16 sebagai berikut:

Gambar 4.1
Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa tidak ada pola yang jelas, setiap titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

C. Analisis Data

1. Koefisien Determinasi

Uji determinan digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel

⁷ Masrukin, *Statistik Inferensial Aplikasi Progam SPSS*, 125

dependen. R^2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya R^2 sama dengan 1, maka prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen.⁸

Untuk memperkirakan atau meramalkan nilai variabel dependen (Y), perlu dilakukan perhitungan variabel-variabel lain yang ikut mempengaruhi Y. Dengan demikian antara variabel baik dependen dan independen tentunya mempunyai hubungan atau korelasi. Dalam penelitian ini variabel dependen atau terikat (Y) adalah Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya variabel independen atau bebas adalah efisiensi PBB-P2, efektivitas PBB-P2 dan Kontribusi PBB-P2. Hasil analisis korelasi dan regresi berganda dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1.000 ^a	1.000	.999	1.34370	2.942

a. Predictors: (Constant), Kontribusi PBB-P2, Efisiensi PBB-P2, Efektivitas PBB-P2

b. Dependent Variable: PAD (milyar rupiah)

Berdasarkan hasil *output* SPSS pada tabel 4.5 terlihat bahwa nilai *Adjusted R Square* persamaan regresi pengaruh efisiensi, efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,999. Ini berarti 99% perubahan Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh efisiensi, efektivitas dan kontribusi. Sisanya 1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini seperti retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

⁸ Duwi Priyatno, *Paham Analisis Statistik Data Dengan SPSS*, 66.

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Digunakan untuk mengetahui masing-masing sumbangan variabel bebas secara parsial terhadap variabel tergantung menggunakan uji masing-masing koefisien regresi variabel bebas apakah mempunyai pengaruh yang bermakna atau tidak terhadap variabel terikat.⁹ Untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan signifikan atau tidak, maka perlu membandingkan antara T_{hitung} dengan T_{tabel} dengan ketentuan:

$T_{hitung} > T_{tabel}$ maka H_0 ditolak

$T_{hitung} < T_{tabel}$ maka H_0 diterima

Tabel 4.6

Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-736.610	18.794		-39.195	.016		
Efisiensi PBB-P2	13.867	1.039	.237	13.347	.048	.690	1.448
Efektivitas PBB-P2	12.421	.189	1.224	65.604	.010	.625	1.600
Kontribusi PBB-P2	-48.059	1.311	-.774	-36.663	.017	.489	2.047

a. Dependent Variable: PAD (milyar rupiah)

Sumber: data sekunder diolah peneliti

Tabel di atas menunjukkan hasil uji statistik t antara variabel independen dengan variabel dependen sebagai berikut:

- a. Pengaruh efisiensi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015-2019

Dengan pengujian satu sisi yang menggunakan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 0.5$ dan dengan derajat kebebasan $df (N - k - 1) = 15 - 3 - 1 = 11$ diperoleh $t_{tabel} = 1,796$. Karena nilai t_{hitung} bernilai positif, maka kaidah pengambilan keputusannya adalah dikatakan berpengaruh jika nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} . Hasil perhitungan pada regresi linier berganda diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 13,347. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($13,347 > 1,796$), **sehingga H_1 diterima**. Artinya terdapat pengaruh efisiensi

⁹ Duwi Priyatno, *Paham Analisis Statistik Data Dengan SPSS*, 68.

penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel efisiensi penerimaan PBB-P2 berpengaruh positif signifikan terhadap *Pendapatan Asli Daerah*. Berdasarkan nilai koefisien signifikansi sebesar 0,048 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh efisiensi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus

- b. Pengaruh efektivitas penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015-2019

Dengan pengujian satu sisi yang menggunakan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 0.5$ dan dengan derajat kebebasan $df (N-k-1) = 15-3-1 = 11$ diperoleh $t \text{ tabel} = 1,796$. Karena nilai t hitung bernilai positif, maka kaidah pengambilan keputusannya adalah dikatakan berpengaruh jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Hasil perhitungan pada regresi linier berganda diperoleh nilai t hitung sebesar 65,604. Dengan demikian t hitung lebih kecil dari t tabel ($65,604 > 1,796$), **sehingga H_2 diterima**. Artinya terdapat pengaruh efektivitas penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel efektivitas penerimaan PBB-P2 berpengaruh positif signifikan terhadap *Pendapatan Asli Daerah*. Berdasarkan nilai koefisien signifikansi sebesar 0,010 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh efektivitas penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus

- c. Pengaruh kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015-2019

Dengan pengujian satu sisi yang menggunakan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 0.5$ dan dengan derajat kebebasan $df (N-k-1) = 15-3-1 = 11$ diperoleh $t \text{ tabel} = 1,796$. Karena nilai t hitung bernilai negatif, maka kaidah pengambilan keputusannya adalah dikatakan berpengaruh jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Hasil perhitungan pada regresi linier berganda diperoleh nilai t hitung sebesar -36,663. Dengan demikian t hitung lebih kecil dari t tabel ($-36,663 < 1,796$), **sehingga H_3 ditolak**. Artinya tidak terdapat pengaruh

kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015-2019.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Model analisis regresi berganda ini digunakan untuk mengetahui analisis pengaruh efisiensi, efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus periode 2015-2019. Dari estimasi diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-736.610	18.794		-39.195	.016		
Efisiensi PBB-P2	13.867	1.039	.237	13.347	.048	.690	1.448
Efektivitas PBB-P2	12.421	.189	1.224	65.604	.010	.625	1.600
Kontribusi PBB-P2	-48.059	1.311	-.774	-36.663	.017	.489	2.047

a. Dependent Variable: PAD (milyar rupiah)

Sumber: data sekunder diolah peneliti

Berdasarkan tabel, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = -736,610 + 0,237 X_1 + 1,224 X_2 - 0,774 X_3 + e$$

Persamaan regresi linear berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar -736,610 dapat diartikan bahwa jika nilai variable bebas yaitu Efisiensi PBB-P2 (X1), Efektivitas PBB-P2 (X2), dan Kontribusi PBB-P2 (X3) dianggap konstan atau nol maka nilai variabe nilai perusahaan (Y) konstan sebesar -736,610.
- b. Koefisien regresi variabel efisiensi sebesar 0,237, artinya bahwa setiap kenaikan 1 satuan efisiensi PBB-P2, maka Pendapatan Asli Daerah akan naik sebesar 0,237, demikian halnya jika efisiensi turun 1 satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan turun sebesar 0,237. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara efisiensi dengan

- Pendapatan Asli Daerah, semakin tinggi efisiensi maka semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah.
- c. Koefisien regresi variabel efektivitas sebesar 1,224, artinya bahwa setiap kenaikan 1 satuan efektivitas PBB-P2, maka Pendapatan Asli Daerah akan naik sebesar 1,224, demikian halnya jika efektivitas PBB-P2 turun 1 satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan turun sebesar 1,224. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara efektivitas PBB-P2 dengan Pendapatan Asli Daerah, semakin tinggi efektivitas PBB-P2 maka semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah.
 - d. Koefisien regresi variabel kontribusi PBB-P2 sebesar - 0,774, artinya bahwa setiap menurunkan 1 satuan kontribusi PBB-P2, maka Pendapatan Asli Daerah akan turun sebesar 0,774, demikian halnya jika kontribusi naik 1 satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan naik sebesar 0,774. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara kontribusi PBB-P2 dengan Pendapatan Asli Daerah, semakin tinggi kontribusi PBB-P2 maka semakin rendah Pendapatan Asli Daerah.
 - e. Koefisien e atau *error* menunjukkan bahwa terdapat variabel lain yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
- 4. Analisis Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Kudus**

Besarnya tingkat efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dihitung dengan menggunakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Besarnya tingkat efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Kudus tahun 2015 hingga 2019 dapat dilihat pada tabel 4.9

Tabel 4.8
Tingkat Efisiensi PBB-P2 tahun 2015-2019

Tahun	Biaya Pemungutan PBB-P2 (Rp)	Realisasi Penerimaan PBB-P2 (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
2015	917.720.922	17.427.506.090	5,27
2016	760.937.426	17.862.505.528	4,26
2017	1.198.245.479	20.175.738.000	5,94
2018	1.376.574.906	23.911.343.000	5,76
2019	1.132.917.235	25.497.514.000	4,44
Rata-rata			5,13

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus

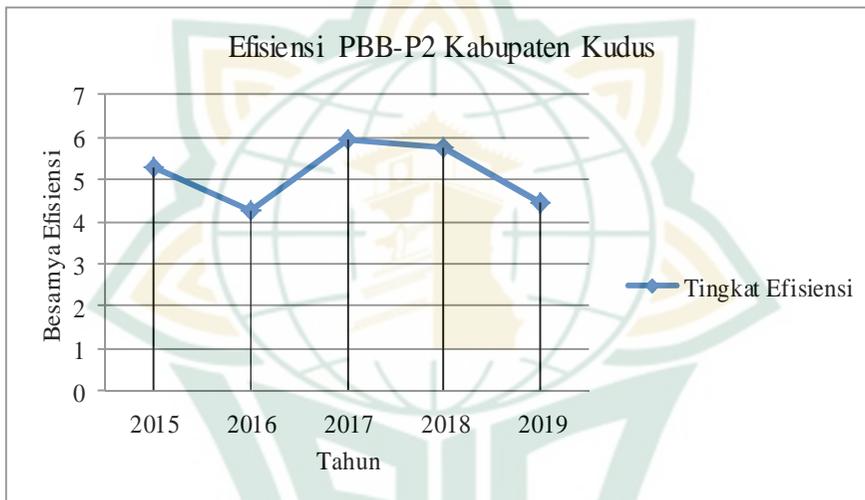
Menurut tabel 4.8, pada tahun 2015 Kabupaten Kudus memperoleh PBB-P2 sebesar Rp.17.427.506.090 dengan biaya pemungutan Rp.917.720.922 sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 5,27% dengan kategori efisien menurut Depdagri, kepmendagri No.690.900.327. Pada tahun 2016 terjadi kenaikan perolehan PBB-P2 sebanyak Rp.17.862.505.528 dengan biaya pemungutan yang menurun menjadi Rp.760.937.426 dan diperoleh tingkat efisiensi sebesar 4,26% dengan kategori sangat efisien. Tingkat efisiensi tahun 2016 mengalami kenaikan 1,01% dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2017 perolehan PBB-P2 meningkat menjadi Rp.20.175.738.000 diikuti kenaikan biaya pemungutan menjadi Rp.1.198.245.479 sehingga memperoleh tingkat efisiensi sebesar 5,94% dengan kategori efisien. Namun, tingkat efisiensi tahun 2017 mengalami penurunan 1,68% dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2018 penerimaan PBB-P2 sebesar Rp.23.911.343.000 dengan biaya pemungutan Rp.1.376.574.906 sehingga memperoleh tingkat efisiensi prosentase 5,76% dengan kategori efisien. Tingkat efisiensi tahun 2018 mengalami kenaikan 0,27% dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2019 penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kudus meningkat menjadi RP.25.497.514.000 dengan biaya pemungutan sebanyak Rp.1.132.917.235 sehingga memperoleh prosentase 4,44% dengan kategori sangat efisien menurut Depdagri, kepmendagri No.690.900.327. Tingkat efisiensi tahun 2019 mengalami kenaikan 1,32% dibandingkan tahun 2018.

Dari data yang diperoleh dan diolah dari BPPKAD Kabupaten Kudus dapat dilihat tingkat efisiensi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kudus tahun 2015-2019. Tingkat efisiensi

tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan nilai efisiensi sebesar 4,26%, sedangkan tingkat efisiensi terendah terjadi pada tahun 2017 dengan nilai efisiensi sebesar 5,94%. Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kudus termasuk efisien karena rata-rata efisiensi yang diperoleh tahun 2015-2019 memperoleh 5,13%.

Perkembangan efisiensi pemungutan PBB-P2 tahun 2015-2019 dapat digambarkan dengan gambar 4.1

Gambar 4.2
Grafik Perkembangan Efisiensi PBB-P2



5. Analisis Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Kudus

Besarnya tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dihitung dengan menggunakan perbandingan antara target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Besarnya tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Kudus tahun 2015 hingga 2019 dapat dilihat pada tabel 4.10

Tabel 4.9
Tingkat Efektivitas PBB-P2 tahun 2015-2019

Tahun	Target Penerimaan PBB-P2 (Rp)	Realisasi Penerimaan PBB-P2 (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)
2015	17.150.000.000	17.427.506.090	101,62
2016	17.800.000.000	17.862.505.528	100,35
2017	19.476.868.000	20.175.738.000	103,59
2018	21.500.000.000	23.911.343.000	111,22
2019	23.690.000.000	25.497.514.000	107,63
Rata-rata			104,88

Menurut tabel 4.9, pada tahun 2015 target penerimaan PBB-P2 yang ditetapkan sebesar Rp.17.150.000.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.17.427.506.090 sehingga memperoleh tingkat efektivitas sebesar 101,62% dan termasuk dalam kategori sangat efektif menurut Depdagri, kepmandagri No.690.900.327. Tahun 2016 penerimaan PBB-P2 ditarget sebesar Rp.17.800.000.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 17.862.505.528 sehingga diperoleh tingkat efektivitas 100,35%. Tingkat efektivitas tahun 2016 mengalami penurunan 1,27% dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2017 target penerimaan PBB-P2 yang ditetapkan sebesar Rp. 19.476.868.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 20.175.738.000 sehingga memperoleh tingkat efektivitas sebesar 103,59% dan termasuk dalam kategori sangat efektif. Tingkat efektivitas tahun 2017 mengalami kenaikan 3,24% dibandingkan tahun 2016. Mengacu pada realisasi pendapatan tahun 2017, pada tahun 2018 target penerimaan dinaikkan menjadi 21.500.000.000 dengan realisasi pendapatan sebesar 23.911.343.000 sehingga memperoleh tingkat efektivitas sebesar 111,22%. Tingkat efektivitas meningkat sebesar 7,63% dibandingkan efektivitas tahun 2017. Pada tahun 2019 target penerimaan dinaikkan menjadi 23.690.000.000 dan memperoleh pendapatan sebesar 25.497.514.000 dengan tingkat efektivitas sebesar 107,63%, mengalami penurunan sebesar 3,59% dibanding tahun 2018.

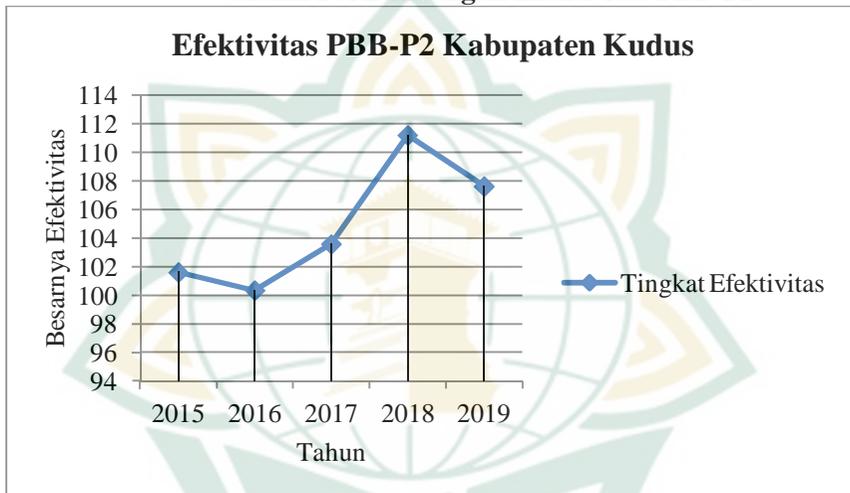
Dari data yang diperoleh dan diolah dari BPPKAD Kabupaten Kudus dapat dilihat tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kudus tahun 2015-2019. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan nilai efektivitas sebesar 111,22%, sedangkan tingkat efektivitas terendah terjadi pada

tahun 2016 dengan nilai efektivitas sebesar 100,35%. Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kudus termasuk sangat efektivitas karena rata-rata efektivitas yang diperoleh tahun 2015-2019 memperoleh 104,88%.

Perkembangan efektivitas pemungutan PBB-P2 tahun 2015-2019 dapat digambarkan dengan gambar 4.2

Gambar 4.3

Grafik Perkembangan Efektivitas PBB-P2



6. Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus

Besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung dengan menggunakan perbandingan realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) antara dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Kudus tahun 2015 hingga 2019 dapat dilihat pada tabel 4.11

Tabel 4.10

Tingkat Kontribusi PBB-P2 tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Penerimaan PBB-P2 (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2015	17.427.506.090	259.295.905.248	6,72
2016	17.862.505.528	279.239.106.717	6,40

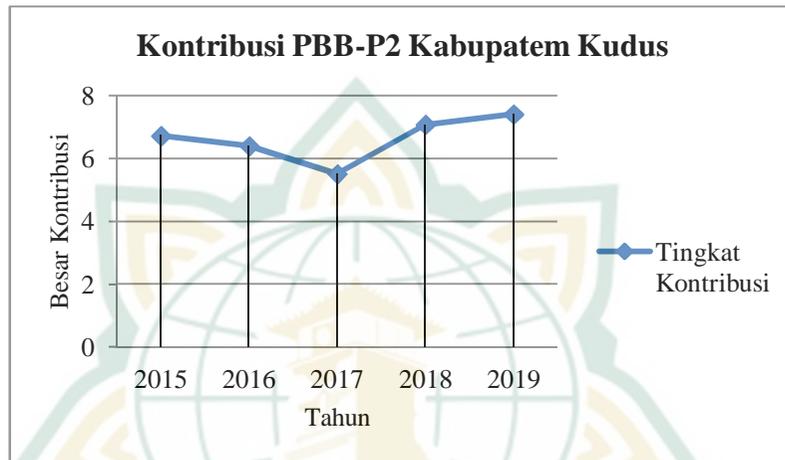
2017	20.175.738.000	366.031.203.000	5,51
2018	23.911.343.000	337.364.609.000	7,08
2019	25.497.514.000	343.821.947.000	7,41
Rata-rata			6,62

Menurut tabel 4.10, pada tahun 2015 Kabupaten Kudus memperoleh PAD sebesar Rp.259.295.905.248 dengan realisasi penerimaan PBB-P2 Rp. 17.427.506.090 sehingga diperoleh tingkat kontribusi sebesar 6,72% dengan kategori sangat kurang menurut Depdagri, kepmendagri No.690.900.327. Pada tahun 2016 terjadi kenaikan perolehan PAD sebanyak Rp. 279.239.106.717 dengan realisasi penerimaan PBB-P2 Rp. 17.862.505.528 dan diperoleh tingkat kontribusi sebesar 6,40% dengan kategori sangat kurang. Tingkat kontribusi tahun 2016 mengalami penurunan 0,32% dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2017 perolehan PAD meningkat menjadi Rp.366.031.203.000 diikuti kenaikan penerimaan PBB-P2 menjadi Rp. 20.175.738.000 sehingga memperoleh tingkat kontribusi sebesar 5,51% dengan kategori sangat kurang. Namun, tingkat efisiensi tahun 2017 mengalami penurunan 0,89% dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2018 penerimaan PAD sebesar Rp. 337.364.609.000 dengan perolehan PBB-P2 Rp.23.911.343.000 sehingga memperoleh tingkat kontribusi prosentase 7,08% dengan kategori sangat kurang. Tingkat kontribusi tahun 2018 mengalami kenaikan 1,57% dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2019 penerimaan PAD meningkat menjadi Rp. 343.821.947.000 dengan perolehan PBB-P2 sebanyak Rp. 25.497.514.000 sehingga memperoleh prosentase 7,41% dengan kategori sangat kurang menurut Depdagri, kepmendagri No.690.900.327. Tingkat kontribusi tahun 2019 mengalami kenaikan 0,33% dibandingkan tahun 2018.

Dari data yang diperoleh dan diolah dari BPPKAD Kabupaten Kudus dapat dilihat tingkat kontribusi PBB-P2 Kabupaten Kudus tahun 2015-2019. Tingkat kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan nilai kontribusi sebesar 7,41%, sedangkan tingkat kontribusi terendah terjadi pada tahun 2017 dengan nilai kontribusi sebesar 5,51%. Kontribusi pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kudus termasuk sangat kurang bagi PAD karena rata-rata kontribusi yang diperoleh tahun 2015-2019 memperoleh 6,62%.

Perkembangan kontribusi PBB-P2 tahun 2015-2019 dapat digambarkan dengan gambar 4.3

Gambar 4.4
Grafik Perkembangan Kontribusi PBB-P2



D. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat efisiensi, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus tahun 2015 hingga 2019.

1. Pengaruh Efisiensi Penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015-2019

Menurut Mahmudi, semakin kecil nilai rasio efisiensi ini maka semakin baik kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan. Hasil kerja dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

Dari data biaya pemungutan PBB-P2 Kabupaten Kudus serta realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2015-2019 didapatkan nilai rasio efisiensi cukup kecil, yaitu tahun 2015 sebesar 5,27%; tahun 2016 sebesar 4,26%; tahun 2017 5,94%; tahun 2018 5,76%; tahun 2019 sebesar 4,44%. Menurut Depdagri, kepmendagri No.690.900.327, rasio efisiensi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kudus masuk dalam kategori efisien dikarenakan rata-rata efisiensi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kudus sebesar 5,13%

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi penerimaan PBB-P2 berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah. Berdasarkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($13,347 > 1,796$), serta berdasarkan nilai koefisien signifikansi sebesar 0,048 yang lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh efisiensi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015-2019.

Hasil penelitian ini mendukung teori Mahmudi, semakin rendah biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan PBB-P2 maka penerimaan PAD akan semakin tinggi. Biaya pemungutan PBB-P2 Kabupaten Kudus menggunakan anggaran yang cukup rendah dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 5,13% sehingga berpengaruh terhadap penerimaan PAD.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ryfal Yoduke dan Sri Ayem (2015) dengan judul Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014, variabel efisiensi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditunjukkan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2009-2014.¹⁰

2. Pengaruh Efektivitas Penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015-2019

Menurut Mardiasmo apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketetapan waktu dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. Tujuan dari pemerintah daerah melakukan pemungutan PBB-P2 adalah terealisasinya penerimaan PBB-P2 dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari data target dan realisasi penerimaan PBB-P2, didapatkan nilai rasio efektivitas cukup besar yaitu, pada tahun

¹⁰ Ryfal Yoduke dan Sri Ayem, Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014, *Jurnal Akuntansi* 3, No.2 (2015): 40.

2015 sebesar 101,62%; tahun 2016 sebesar 100,35%; tahun 2017 sebesar 103,59%; tahun 2018 sebesar 111,22%; tahun 2019 sebesar 107,63%. Menurut Depdagri, kepmendagri No.690.900.327, rasio efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kudus masuk dalam kategori sangat efektif dikarenakan rata-rata efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kudus sebesar 104,88%

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel efektivitas penerimaan PBB-P2 berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($65,604 > 1,796$), serta berdasarkan nilai koefisien signifikansi sebesar 0,010 yang lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh efektivitas penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015-2019.

Hasil penelitian ini mendukung teori Mardiasmo semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi. Semakin tinggi nilai efektivitas maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kudus cukup tinggi dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 104,88% sehingga memberikan pengaruh besar terhadap penerimaan PAD.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan dilakukan Ikhsan Septiansyah, Diamonalisa Sofianty, Helliana (2018) yang berjudul Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, variabel efektivitas berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹¹

3. Pengaruh Kontribusi Penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015-2019

Menurut Mahmudi kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika pemerintah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan PBB-P2

¹¹ Ikhsan Septiansyah, Diamonalisa Sofianty, dan Helliana, Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, *Prosiding Akuntansi* 4, no.2 (2018):693.

dan potensi penerimaannya semakin tinggi maka kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat.

Dari data realisasi penerimaan PBB-P2 dan realisasi penerimaan PAD, didapatkan nilai rasio kontribusi cukup kecil yaitu, pada tahun 2015 sebesar 6,72%; tahun 2016 sebesar 6,40%; tahun 2017 sebesar 5,51%; tahun 2018 sebesar 7,08%; tahun 2019 sebesar 7,41%. Menurut Depdagri, kepmendagri No.690.900.327, kontribusi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kudus masuk dalam kategori sangat kurang dikarenakan rata-rata kontribusi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kudus hanya sebesar 6,62%

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kontribusi penerimaan PBB-P2 tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($-36,663 > 1,796$), serta berdasarkan nilai koefisien signifikansi sebesar 0,017 yang lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015-2019.

Hal ini dapat terjadi karena pemerintah Kabupaten Kudus kurang optimal dalam menggali sumber-sumber penerimaan PBB-P2 yang menyebabkan kontribusinya terhadap PAD masih sangat kurang. Kontribusi yang diterima masih kurang dikarenakan pertumbuhan penerimaan PAD lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penerimaan PBB-P2

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Septiani Hanipah dan Dudi Pratomo (2015) yang berjudul Pengaruh Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah, variabel Kontribusi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.¹² Namun penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Raudhatun Wardani dan Wida Fadhlia (2017) yang berjudul Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar, yang

¹² Septiani Hanipah dan Dudi Pratomo, Pengaruh Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah *Jurnal e-Proceeding of Management 2*, no.3 (2015): 3285.

memperoleh hasil kontribusi penerimaan PBB-P2 tidak memberikan pengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah.¹³



¹³Raudhatun Wardani dan Wida Fadhlia, Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 2*, no.3(2017):16